



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No.4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 021-3925230, Fax.021-3925227,
Website: www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor: 06/HM.00/I/2024**

Pandangan Komnas HAM tentang Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan dan Agraria dalam Rangka Debat Calon Wakil Presiden

1. Sehubungan dengan rencana debat calon wakil presiden yang akan berlangsung pada 21 Januari 2024 yang secara khusus mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sebagai upaya mencapai tujuan Komnas HAM yang diatur dalam pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, Komnas HAM menyampaikan pandangan terkait dengan tema debat tersebut.
2. Pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam kaitannya dengan energi, agraria, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan telah diakui setidaknya dalam:
 - a. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
 - b. Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".
 - c. Pasal 11 Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ekosob terkait dengan standar hidup yang layak dan hak setiap orang untuk bebas dari kelaparan.
3. Terkait konflik agraria, Komnas HAM mendorong para calon Presiden dan wakil Presiden untuk menempatkan penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia sebagai prioritas utama untuk diselesaikan pada periode mendatang. Kami mencatat:
 - a. Ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap tanah dan sumberdaya alam masih belum mendapatkan solusi yang adil dan permanen di Indonesia. Per akhir 2023, ATR BPN melaporkan redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 hektar (9,26 persen) dari target 4,1 juta ha. Hal ini berbeda dengan capaian sertifikasi tanah yang mencapai 1,43 juta ha atau tiga kali lebih besar dari target.
 - b. Tiga tahun terakhir, yaitu 2021-2023, Komnas HAM telah menerima dan menangani aduan sebanyak 1.675 dugaan pelanggaran HAM terkait konflik agraria dan SDA. Kasus terkait agraria dan sumber daya alam merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan. Kasus-kasus ini meliputi konflik terkait pertanahan, perkebunan, infrastruktur, Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pertambangan.
 - c. Terkait kekerasan dalam konflik agraria, Komnas HAM mengidentifikasi akar masalah di antaranya adalah ego sektoral antar kementerian dan lembaga, tata kelola yang belum

tuntas terkait kawasan hutan dan non hutan, dan lemahnya perlindungan atas masyarakat adat.

4. Terkait energi, Komnas HAM mendorong para kandidat untuk memastikan kerangka hak asasi manusia dalam setiap rantai transisi energi. Sejauh ini Komnas HAM telah mencatat terjadi dugaan pelanggaran dan potensi pelanggaran HAM utamanya sehubungan dengan agenda transisi energi sebagai bagian mitigasi perubahan iklim. Komnas HAM mendorong transisi energi yang menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM khususnya kelompok rentan yaitu anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Isu utama transisi energi yang beririsan dengan HAM di antaranya adalah pengadaan lahan, pemulihan HAM pasca produksi bahan bakar fosil dan pemensiunan PLTU, jaring pengaman HAM bagi kelompok rentan, perlindungan masyarakat yang menyampaikan ekspresi dan partisipasinya sehubungan dengan proyek energi yang dikategorikan sebagai objek vital nasional (obvitnas) dan PSN, dan desentralisasi energi di daerah dan komunitas.
5. Terkait pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Komnas HAM mendorong para calon pemimpin pemerintahan untuk memiliki komitmen atas implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dalam setiap aspek dan tahap pembangunan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat wajib dilindungi.
6. Terkait hak atas pangan, Komnas HAM mencatat kejadian kelaparan berulang di Yahukimo Papua pada beberapa tahun terakhir. Pencegahan terhadap situasi ini perlu mendapatkan atensi serius dari negara karena menyangkut hak setiap orang atas pangan.
7. Sehubungan dengan situasi terkait agraria, SDA, lingkungan, dan energi tersebut di atas, Komnas HAM menyampaikan beberapa agenda yang perlu menjadi perhatian para calon presiden dan calon wakil presiden, sebagai berikut:
 - a. Perlunya peninjauan kembali berbagai regulasi, kebijakan dan keputusan pemerintah dan kementerian terkait agraria dan sumber daya alam untuk memperbaiki kebijakan yang kompartemental antar kementerian dalam mencapai dan mendorong reforma agraria.
 - b. Perlunya peninjauan kembali atas berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat akses kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia bagi setiap warga, khususnya masyarakat marginal dan rentan seperti petani kecil, masyarakat hukum adat, penyandang disabilitas, dan perempuan.
 - c. Perlunya kebijakan negara terkait pangan untuk memastikan menghormati, memenuhi, dan melindungi hak setiap orang atas pangan, dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi di Indonesia yang beragam.
 - d. Perlunya strategi, kelembagaan, dan kebijakan yang pada prinsipnya bertujuan mempercepat pelaksanaan reforma agraria berbasis hak asasi manusia, yang didalamnya memastikan hak hak Masyarakat lokal, kelompok adat, dan marginal lainnya.
8. Komnas HAM berharap bahwa semua capres dan cawapres akan menyampaikan komitmen yang serius dalam bidang agraria, SDA, energi, dan lingkungan yang berkelanjutan, demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, 19 Januari 2024

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI

Atnike Nova Sigiro

Ketua

***Narahubung:

Saurin P Siagian (0811-1330-042)